

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Per Posisi Tanggal : 28 Desember 2017/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GENIUS UMAR**
2. Jabatan : **CALON WALIKOTA**
3. NHK : **170583**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/190 m2 di Kota JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/180 m2 di Kota JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/45 m2 di Kota JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/- m2 di Kota JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 429.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di Kota JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/- m2 di Kota PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 3709 m2/1000 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 17020 m2/- m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/- m2 di Kota DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/150 m2 di Kota BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/50 m2 di Kota BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

Rp. 5.669.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

Rp. 307.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 82.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 328.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

III. HUTANG

Rp. 590.000.000



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
5. Pengumuman ini disahkan di Jakarta tanggal **7 Maret 2018**.